

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA

Ardiyansyah¹, Sahabuddin^{2*} Donny Wijaya³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: sahabuddinsaha@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 26 November 2025

Revised: 06 Desember 2025

Published: 31 Desember 2025

Abstrak

Permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kota Sumbawa Besar, masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah parkir kendaraan yang tidak tertata dengan baik di sejumlah kawasan strategis, seperti di sekitar rumah sakit, sekolah, dan pusat pertokoan, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Kondisi ini menuntut peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis kinerja Satpol PP didasarkan pada indikator evaluasi kinerja birokrasi menurut Agus Dwiyanto, yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Sumbawa secara umum telah berjalan dan memenuhi sebagian besar indikator kinerja tersebut. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek akuntabilitas yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban kinerja, keterbukaan, dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kinerja Satpol PP secara berkelanjutan guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang lebih efektif di Kabupaten Sumbawa.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Ketertiban dan ketentraman yang terjaga dengan baik menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berada pada pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui perangkat daerah, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran tersebut semakin krusial seiring dengan meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat perkotaan yang ditandai oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kondisi tersebut seringkali memunculkan berbagai

permasalahan ketertiban umum, seperti pelanggaran lalu lintas lokal, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, parkir kendaraan yang tidak tertata, serta gangguan ketentraman masyarakat di ruang publik.

Kabupaten Sumbawa, khususnya Kota Sumbawa Besar sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, terutama terkait pengelolaan parkir dan penggunaan ruang publik. Parkir kendaraan yang tidak tertib di sekitar fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, dan kawasan pertokoan, kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan peraturan daerah dan pengendalian ketertiban umum masih memerlukan peningkatan yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kinerja Satpol PP tidak hanya diukur dari intensitas penertiban yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan institusi tersebut dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif terhadap keluhan masyarakat, bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Satpol PP menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak peraturan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP. Selain itu, persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP juga dapat memengaruhi tingkat penerimaan dan dukungan publik terhadap kebijakan ketertiban umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana Satpol PP Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja Satpol PP guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang lebih optimal di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan daerah, serta laporan kinerja yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penilaian kinerja Satpol PP mengacu pada indikator evaluasi kinerja birokrasi menurut Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah dijalankan sesuai dengan mandat kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Satpol PP berperan sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menciptakan ketentraman masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, peran ini menjadi semakin strategis mengingat meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik, khususnya di kawasan perkotaan, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban apabila tidak dikelola secara baik.

Dari sisi produktivitas, Satpol PP Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai kegiatan penertiban dan pengamanan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut meliputi patroli wilayah, penertiban parkir liar, pengamanan kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Produktivitas ini terlihat dari intensitas kehadiran petugas di lapangan dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sepanjang periode penelitian. Namun demikian, produktivitas tersebut masih menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan jumlah personel, luas wilayah kerja yang cukup besar, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya pengawasan dan penertiban di seluruh wilayah, sehingga beberapa permasalahan ketertiban umum, seperti parkir sembarang dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, cenderung terjadi secara berulang.

Aspek kualitas layanan menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Sumbawa telah berupaya menerapkan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam setiap pelaksanaan tugas. Petugas di lapangan umumnya mengedepankan upaya sosialisasi, teguran lisan, dan pembinaan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan penertiban yang bersifat tegas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan semata-mata objek penertiban. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa

kualitas layanan Satpol PP masih dipersepsi berbeda oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menilai kehadiran Satpol PP cukup membantu dalam menciptakan ketertiban, sementara sebagian lainnya menilai bahwa tindakan yang dilakukan belum konsisten dan kurang memberikan efek jera. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kesinambungan tindakan dan kejelasan komunikasi antara petugas dan masyarakat.

Responsivitas Satpol PP Kabupaten Sumbawa dalam menanggapi laporan dan keluhan masyarakat secara umum tergolong cukup baik, terutama terhadap laporan yang disampaikan melalui jalur formal pemerintahan, seperti desa, kelurahan, dan kecamatan. Satpol PP relatif cepat melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum yang bersifat mendesak. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, tidak semua keluhan dapat ditangani secara cepat dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan responsivitas tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga pada dukungan sistem informasi dan mekanisme pengelolaan aduan yang efektif.

Dari aspek responsibilitas, kinerja Satpol PP Kabupaten Sumbawa menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan aturan dan kewenangan yang dimiliki. Setiap tindakan penertiban didasarkan pada peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku. Petugas di lapangan juga berupaya menghindari tindakan represif yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, pemerintah desa, dan aparat keamanan lainnya. Kurangnya koordinasi ini berdampak pada efektivitas penertiban, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan responsibilitas kinerja Satpol PP.

Aspek akuntabilitas merupakan indikator kinerja yang paling lemah dibandingkan indikator lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kinerja Satpol PP kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan penertiban, hasil yang dicapai, serta tindak lanjut dari laporan masyarakat masih terbatas dan belum disampaikan secara terbuka. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang mengetahui sejauh mana kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Rendahnya transparansi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik serta memunculkan anggapan bahwa kegiatan penertiban hanya bersifat insidental dan formalitas.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa telah memenuhi indikator evaluasi kinerja birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, namun belum sepenuhnya optimal. Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas telah menunjukkan capaian yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya, sistem kerja, dan koordinasi. Sementara itu, aspek akuntabilitas menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan

perhatian serius. Upaya peningkatan kinerja Satpol PP ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, serta pembangunan hubungan yang lebih partisipatif dengan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Satpol PP telah melaksanakan berbagai kegiatan penertiban dan pengamanan di ruang publik sebagai upaya menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram. Ditinjau dari indikator evaluasi kinerja birokrasi menurut Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang cukup baik.

Meskipun demikian, kinerja Satpol PP Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, aspek akuntabilitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal transparansi kinerja, pertanggungjawaban kepada publik, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan mekanisme akuntabilitas yang lebih terbuka dan partisipatif agar pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.